KEMENTERIAN KEUANGAN RI						
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						

KKPI7AFJ

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

₩.										
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 NPWP : 68 807 566 2 722 000										
A.2 I	A.2 NIK :									
A.3 Nama : SYAHRIAL										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK P		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)		
B.1 B.2			B.3	B.4	B.5	B.6	B.7			
	3 21-402-01			4.321.600	4.321.600	0	5	216.080		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022										
Nama Dokumen Biaya Pembayaran					Tanggal 1 (6 dd 0 3	3 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0										
C.2 Nama Instansi Pemerintah :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit Organisasi :										
C.4	4 Tanggal : 1 (1 6	dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_		
C.5			UMADI							
			ini saya menyatakan ba ngani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya			
				dengan ketentuan yang iik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara		